



KR-Sukro Riyadi

MENYULAM JARING: Seorang nelayan di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, menyulam jaring sebelum berburu udang di Muara Sungai Opak, Rabu (17/11). Sekali turun ke sungai, rata-rata nelayan mampu mendapatkan 2-3 kg udang dengan harga jual Rp 50.000/kg.

MENTERI PERTANIAN PASTIKAN

'Food Estate' Untungkan Petani

TEMANGGUNG (KR) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau lokasi *food estate* di lereng Gunung Sindoro, Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (18/11) yang rencananya bakal dikunjungi Presiden Joko Widodo.

Mentan tiba di lokasi *food estate* dengan mengendarai sepeda motor trail bersama sejumlah pejabat dan petani. Sebelumnya ia transit di rumah Kepala Desa Bansari yang berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi *food estate*.

Setiba di lokasi, Mentan mendapat penjelasan analisa usaha sebelum dan sesudah menerapkan *food estate*. Selanjutnya, langsung menuju lahan pertanian di bawah Embung Bansari. Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kedatangannya ini untuk mengecek pelaksanaan program *food estate* yang merupakan salah satu program

andalan dari Presiden Joko Widodo. "Rencananya Presiden akan melakukan kunjungan, kita pastikan semua berjalan sesuai rencana," katanya.

Mentan mengatakan, *food estate* atau mengkorporasi petani agar akerselerasi dan ada peningkatan ekonomi, sistem ini bisa berjalan sehingga hasil produksinya akan lebih banyak. Ia juga memastikan produksi terjual dengan menghadirkan agregator atau pembeli yang jelas. "Jadi jangan menanam jika pembelinya tidak jelas," katanya.

Menurut Mentan, keuntungan *food*

estate sangat banyak. Di antaranya jika nanti sudah menunjukkan keberhasilan, akan banyak rakyat datang berduyun-duyun untuk berkorporasi bersama kelompoknya. "Ini yang paling penting, mengedukasi petani lain. Selain itu jika kita jalan sendiri ongkos produksinya menjadi mahal," ujarnya.

Diharapkan luasan lahan 300 hektare untuk *food estate* di Kabupaten Temanggung bisa dicapai. Apalagi tujuannya tidak hanya untuk nasional tetapi ekspor ke Amerika dan India.

Ketua Kelompok Tani Agra Prana Jaya Temanggung Siswanto mengatakan, keuntungan petani dengan penerapan *food estate* adalah mendapatkan kepastian pasar dari beberapa pembeli. "Jadi sudah ada pembeli dengan harga kontrak yang menguntungkan," katanya. (Osy)-f

SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jadwal Pemilu 2024 di Tangan KPU

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan, jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E, UU Pemilu Pasal 167 dan Keputusan MK No 92/2016, Pemilu diselenggarakan KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

"Otoritas penentuan jadwal pemilu mutlak berada di tangan KPU. Pasal 167 UU Pemilu secara tegas menyebutkan, penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditentukan dengan keputusan KPU," kata Junimart, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/11).

Junimart menjelaskan, jadwal dari KPU tersebut akan dibawa dan dikonsultasikan di Komisi II DPR bersama Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam bentuk rapat kerja untuk diambil keputusan. "Artinya jadwal pemilu yang sudah diten-

tukan KPU sifatnya hanya sebatas konsultasi saja di DPR," ucap Junimart.

Menurutnya, setelah kerja tersebut, kemudian KPU menindaklanjutinya dengan pemaparan pra-tahapan, tahapan dan seterusnya. "Hingga nanti pemungutan, penghitungan kertas suara hasil coblosan dan pengumuman hasil pemungutan hingga penetapan," jelasnya.

Ia mengatakan, konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) tidak mengikat. Artinya, apa yang disampaikan Komisi II DPR atau pemerintah sifatnya hanya sebatas usulan. "Komisi II DPR wajib fokus mengkritisi dasar penentuan jadwal hingga tahapan hasil akhir pemilu sesuai tujuan dari pemilu itu sendiri. KPU dan penyelenggara pemilu harus independen, tidak bisa diintervensi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Junimart menyampaikan, waktu tahapan Pemilu 2024 bisa saja dipersingkat tanpa mengurangi proses dan nilai pemilu itu sendiri, mengingat situasi dan kondisi saat ini. (Ant)-f

DIDERA PANDEMI BERLARUT-LARUT

Sektor Penerbangan Berharap Pulih

JAKARTA (KR) - Sektor transportasi udara saat ini tengah mengalami masa yang sangat berat di tengah terpaan pandemi Covid-19. Walaupun demikian, baik operator ataupun regulator, optimis industri penerbangan akan segera kembali pulih.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemulihan industri penerbangan nasional menjadi prioritas bersama, yang harus dikolaborasi dengan baik oleh semua pemangku kepentingan di sektor ini. "Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan siap mendukung, bekerja sama dan berkolaborasi dengan Indonesia National Air Carrier Association (INACA)," kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam Rapat Umum (RUA) INACA yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (18/11).

Menhub juga mengatakan, pemerintah melalui Kemenhub sangat berharap agar INACA dapat memberikan kontribusi

positif pada perkembangan industri penerbangan di Tanah Air.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) DIY, Bonny Samudra mengemukakan, kondisi terpuruknya di dunia penerbangan berpengaruh pada usaha perjalanan wisata, termasuk agen penjualan tiket. "Permintaan terhadap jasa penerbangan masih jauh dari kembali ke masa sebelum pandemi. Kalau ada yang bepergian menggunakan pesawat karena pertimbangan lain, seperti dalam rangka perjalanan dinas (ada yang membiayai), karena tidak ada lagi moda transportasi lain yang dipilih dan karena banyaknya dana yang tersedia, sehingga cukup untuk membeli tiket dan biaya lainnya. "Jumlahnya yang memiliki keperluan seperti ini tidak banyak. Paling 30 persen dari sebelum pandemi," ujar Bonny yang Pimpinan Intras Tour.

Dikemukakan, selama pandemi, pihaknya dan perusahaan penerbangan, minim melakukan promosi. (Imd/Jon)-d

BAPPENAS LUNCURKAN STRANAS KELANJUTUSIAAN

Strategi Hadapi 'Silver Economy'

JAKARTA (KR) - Sebagai negara keempat dengan populasi terbesar dunia sekitar 270 juta jiwa, Indonesia mendekati cepatnya penuaan penduduk. Pada 2020, penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 26,4 juta jiwa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan, pada 2045 mendatang penduduk lansia akan berjumlah sekitar 61,4 juta jiwa atau sekitar 20-25 persen dari total penduduk.

"Indonesia diprediksi menjadi negara dengan *silver economy* terbesar setelah Tiongkok dan Jepang. Untuk itu, sekarang waktu yang penting untuk mulai mengembangkan berbagai kebijakan multisektor yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan agar kita siap menghadapi penuaan penduduk," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Peluncuran dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan secara daring, Kamis (18/11), di Jakarta.

Salah satu strategi menghadapi penuaan penduduk, lanjut Suharso, adalah digitalisasi yang memudahkan lansia untuk

mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial, sekaligus mengurangi kontak fisik dan risiko penularan Covid-19. Terlebih, literasi digital lansia saat ini masih relatif rendah, yakni 46,68 persen pada 2020. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mengusung digitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia (SILAN) dalam bentuk aplikasi berbasis website untuk pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus, serta berbasis Android yang dapat diakses di wilayah uji coba.

"Layanan lansia terintegrasi perlu dukungan konkret Pemerintah Daerah hingga tercermin dalam kebijakan berkelanjutan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lansia. Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, kita mendorong komitmen lintas stakeholder, Pemerintah dan swasta di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas untuk mensejahterakan lansia kita," tandas Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas Pungky Sumadi dalam webinar bersama Asian Development Bank melalui The Japan Fund for Poverty Reduction dan The Republic of Korea e-Asia Knowledge Partnership Fund tersebut. (San)-d

TES PCR DI INDONESIA

Erick Sebut Kategori Murah

SLEMAN (KR) - Penetapan harga tes PCR oleh Kementerian Kesehatan telah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan penentuan harga hingga mekanisme lain *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* ditetapkan secara transparan. Kebijakan itu dibahas melalui rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengemukakan hal tersebut dalam pengantar Webinar 'Kontroversi Tes PCR: Bisnis atau Krisis' yang diselenggarakan Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (18/11). Webinar dengan pidato kunci Menkopolkum Mahfud MD dan menghadirkan pembahas Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi SH dan Dosen FH UII Agus Triyanta.

Mahfud MD menyebutkan, pada awal pandemi ada kepanikan luar biasa pada teror atau horor pandemi. Semua tidak tahu dan bagaimana penanggulangannya juga tidak mengerti. Namun agar tidak memperburuk keadaan, penanggulangan

Covid-19 harus sejalan dengan penanggulangan ekonomi. "Sehingga kemudian ada aturan impor bantuan Covid-19 bebas pajak. Saya banyak diminta rekomendasi untuk impor bantuan itu. Sehingga ada yang impor 10.000 misalnya, yang 500 untuk membantu. Itu biasa," ujarnya.

Erick mengemukakan, harga tes PCR yang berlaku di Indonesia termasuk kategori murah. Harga ini juga telah melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kalau dibandingkan banyak negara, kita masuk kategori termurah, ini sesuai audit yang dilakukan BPKP," tandasnya.

Mundur sedikit ke belakang, menurutnya, tes ini bagian dari tadi *trace and tracing*. "Dan awal dulu harganya ada yang Rp 2 juta hingga Rp 5 juta waktu itu. Hari ini sekitar Rp 300.000," katanya.

Guntur Syahputra mengindikasikan banyaknya potensi persaingan tidak sehat dalam bisnis tes PCR. Menurutnya, Pemerintah menetapkan HET harapannya agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau. Walaupun harganya fluktuatif karena suplai komponennya fluktuatif sejak awal pandemi. (Fsy)-f

BERSUMBER DARI DANA KEISTIMEWAAN

Pembangunan Jalan Tawang-Ngalang Memantik Ekonomi



KR-Devid Permana

Podcast Rembag Kaistimewaan bertema 'Pembangunan Ruas Jalan Tawang-Ngalang Pemantik Perekonomian'.

PEMANFAATAN Dana Keistimewaan urusan tata ruang, salah satunya digunakan untuk pembangunan ruas Jalan Tawang-Ngalang di Kabupaten Gunungkidul. Jalan sepanjang 9,6 km ini akan menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Sleman dan Gunungkidul yang diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY Kusno Wibowo ST MSI mengatakan, Kabupaten Gunungkidul memiliki satuan ruang strategis yaitu Kars Gunungsewu dan Pantai Selatan. Sementara di Kabupaten Sleman ada Candi Prambanan dan Candi Ijo. Namun ada masalah untuk menghubungkan satuan ruang strategis di dua kabupaten tersebut, yaitu ketiadaan akses sarana prasarana jalan yang memadai.

Menurut Kusno, pembangunan ruas Jalan Tawang-Ngalang sepanjang 9,6 km yang berada di Kabupaten Gunungkidul ini dibagi dalam 5 segmen, karena alokasi Dana Keistimewaan untuk infrastruktur terbatas. Tahun 2021 ini baru dibangun dua segmen yaitu segmen 1 dan 5. Tahun 2022 akan dilanjutkan pembangunan untuk segmen 4 dan tahun 2023 segmen 2 dan 3. "Kita targetkan tahun 2024 Jalan Tawang-Ngalang selesai dibangun dan bisa berfungsi sempurna," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Kusno, pembangunan Jalan Tawang-Ngalang ini sejalan dengan visi misi dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang menginginkan wilayah selatan sebagai halaman muka/dapan DIY sehingga wilayah selatan DIY perlu terus dikembangkan, agar dapat menyamai kemajuan yang ada di wilayah utara.

Aris Eko Nugroho mengatakan, menghubungkan satuan ruang strategis di Gunungkidul dan Sleman itu sangat penting, karena akan

menyambungkan wisata unggulan yang dimiliki kedua daerah. Selain itu di jalur Gunungkidul-Sleman terdapat Jembatan Sembada Handayani yang megah yang harus didukung dengan akses jalan yang memadai. Karena kalau tidak dihubungkan dengan jalan yang memadai, fungsi jembatan tersebut menjadi tidak maksimal.

"Ini menjadi perhatian kita bersama untuk membina sektor transportasi, karena keberadaan Jalan Tawang-Ngalang ini menjadi pengungkit perekonomian warga. Memang semua tidak bisa kita biayai sekaligus menggunakan Dana Keistimewaan, harus ada prioritas. Tapi target tahun 2023 pembangunan ruas Jalan Tawang-Ngalang bisa selesai, juga jalan yang ada di Prambanan," ujarnya.

Aris berharap, lurah di sepanjang Jalan Tawang-Ngalang bisa berkolaborasi membuat program strategis untuk semakin menguatkan perekonomian warga dengan adanya infrastruktur jalan ini. Aris juga berpesan kepada para lurah untuk sedini mungkin bersama warga mempersiapkan diri mengelola lahan-lahan di sepanjang ruas Jalan Tawang-Ngalang.

"Mumpung pembangunan jalan ini belum selesai, warga harus disiapkan. Karena kami khawatir, kalau jalan sudah jadi, tapi warga belum siap, lahan yang ada bukan lagi jadi milik masyarakat setempat tapi dimiliki

para pemodal. Mumpung belum kejadian, ini perlu disiapkan secara matang," katanya.

Sukasto menuturkan, masyarakat di ruas Jalan Tawang-Ngalang khususnya di Kalurahan Ngoro-oro sangat bersyukur dan bangga dengan dibangunnya Jalan Tawang-Ngalang yang menghubungkan Gunungkidul dan Sleman ini. Selain arus lalu lintas menjadi lancar, peningkatan perekonomian sudah dirasakan oleh warga. Bahkan simpang empat Tawang, saat ini sudah berkembang menjadi simpang lima. "Kita juga sudah siapkan lahan terbuka yang rencananya dibuat *rest area* untuk pengembangan ekonomi," ujarnya.

Menurut Sukasto, kebanyakan profesi warga Ngoro-oro adalah petani dan berkebun. Dengan adanya pembangunan Jalan Tawang-Ngalang ini membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan bidang ekonomi lain yaitu kuliner dengan ikonnya Tape Menir yang tidak ada di daerah lain. "Di area simpang lima Tawang menuju Jembatan Handayani, saat ini banyak bermunculan usaha kuliner oleh warga. Kita akan terus dorong UMKM di Ngoro-oro ini harus jalan sebelum ruas Jalan Tawang-Ngalang ini jadi setara persen sehingga nanti ketika jalan ini sudah berfungsi sempurna, UMKM warga Ngoro-oro juga sudah siap sepenuhnya," katanya. (Dev)-d